

Manajemen Model Tata Kelola Berbasis *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam Penguatan Ekosistem Ekonomi Industri Halal

Wawan Wahyuddin¹, Itang², Hadi Peristiwo³

¹ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Corresponding Author:

Wawan Wahyuddin, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: hadi.peristiwo@uinbanten.ac.id

Abstract

The application of Environmental, Social, and Governance (ESG) management principles plays a crucial role in enhancing the competitiveness and sustainability of the halal industry's economy. The environmental principle emphasizes the need for environmentally friendly halal production through proper waste management, energy efficiency, and the implementation of a circular economy that focuses on environmental preservation. The social principle includes aspects of justice, protection of workers' rights, community empowerment, and the fulfillment of the *halalan thayyiban* principles that ensure safety, health, and benefits for consumers. Meanwhile, the governance principle serves to establish a transparent and accountable regulatory system based on sharia values, thereby strengthening public trust and the integrity of the halal industry. This ESG-based governance model not only reinforces the halal industry ecosystem at the national level but also supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) globally. Furthermore, the implementation of this model encourages the halal industry to adapt to international market demands, expand global networks, and increase investment attractiveness based on sustainability. However, challenges in implementation still include regulatory harmonization, consistency in standard application, and the readiness of business actors to fully adopt ESG principles. Therefore, synergy among the government, business sector, academia, society, and halal certification institutions becomes the key to success. This study is expected to provide both conceptual and practical contributions in developing an inclusive, sustainable, and ethically oriented halal industry governance model grounded in sharia values.

Keywords: Management, ESG, Ecosystem, Halal Industry

Abstrak

Pentingnya penerapan prinsip manajemen *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi industri halal meliputi beberapa hal, diantaranya prinsip lingkungan yang menekankan perlunya produksi halal yang ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penerapan ekonomi sirkular yang berorientasi pada kelestarian alam. Prinsip sosial yang mencakup aspek keadilan, perlindungan hak pekerja, pemberdayaan masyarakat, serta pemenuhan prinsip *halalan thayyiban* yang menjamin keamanan, kesehatan, dan manfaat bagi konsumen. Sedangkan prinsip tata kelola adalah berperan dalam membangun sistem regulasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis pada nilai-nilai syariah yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan integritas industri halal. Model tata kelola berbasis ESG ini tidak hanya memperkuat ekosistem industri halal di tingkat nasional, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara global. Lebih jauh, penerapan model ini mendorong industri halal untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar internasional, memperluas jejaring global, dan meningkatkan daya tarik investasi yang berbasis pada keberlanjutan. Namun demikian, tantangan implementasi masih

mencakup aspek harmonisasi regulasi, konsistensi penerapan standar, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi prinsip ESG secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan lembaga sertifikasi halal menjadi kunci keberhasilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun model tata kelola industri halal yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada etika dan nilai syariah.

Kata kunci : Manajemen, ESG, Ekosistem, Industri Halal

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis yang sangat potensial untuk menjadi pusat ekonomi kreatif halal global (Septiyani & Adinugraha, 2025). Perkembangan industri halal dunia menunjukkan dinamika yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, baik dari konsumen muslim maupun non-muslim. Industri halal saat ini berada di garis depan perkembangan ekonomi syariah yang terus berevolusi, dengan menggabungkan prinsip keberlanjutan dan praktik inovatif dalam operasionalnya (Ernayani & Firman, 2024). Aktivitas perdagangan industri halal di pasar global juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Rahmawati, Thamrin, & Putra (2022) menyebutkan bahwa pengembangan industri halal telah menjadi agenda strategis dalam perencanaan pembangunan ekonomi di berbagai negara di dunia. Secara konseptual, industri halal mencakup seluruh kegiatan produksi dan distribusi yang proses pengolahan, transaksi, serta produknya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sektor-sektor yang termasuk dalam industri halal meliputi *halal food*, *halal fashion*, *halal travel*, dan *halal finance* (Hasanah *et al.*, 2022). Dalam perkembangannya, industri halal tidak lagi sekadar dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban agama, tetapi telah bertransformasi menjadi sektor ekonomi strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing global, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola industri halal menjadi faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan, transparansi, dan legitimasi syariah. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan dalam memperkuat tata kelola tersebut adalah penerapan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka etika syariah. Model tata kelola berbasis ESG menawarkan perspektif integratif yang tidak hanya menekankan efisiensi bisnis, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, serta tata kelola yang akuntabel dan beretika. Penerapan prinsip ESG dalam ekosistem industri halal dapat membangun jembatan antara nilai-nilai syariah dengan standar global keberlanjutan, sehingga industri halal tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan agama, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkeadilan. Dari sisi lingkungan, penerapan prinsip ESG dalam industri halal sangat relevan karena halal pada hakikatnya mengandung prinsip *thayyib* yang menekankan pada kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan (Hamdani & Raffi, 2025).

Industri halal yang mengadopsi prinsip keberlanjutan lingkungan akan memperhatikan siklus hidup produk mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah. Misalnya, rumah potong hewan halal dapat mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah organik dan darah, sehingga tidak mencemari lingkungan. Demikian pula pada industri makanan dan minuman halal, sertifikasi halal dapat

diperkuat dengan sertifikasi hijau yang memastikan praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi air. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *environmental* dalam ESG bukanlah sesuatu yang terpisah dari halal, melainkan dapat menjadi elemen penguatan yang mendukung citra dan keberterimaan produk halal di tingkat global. Dalam konteks ekonomi global yang semakin menekankan pada produk ramah lingkungan, integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola industri halal akan meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar non-muslim yang semakin sadar terhadap isu perubahan iklim. Aspek sosial dalam model tata kelola berbasis ESG juga memiliki irisan kuat dengan ekosistem industri halal (Sari *et al.*, 2024).

Prinsip syariah menekankan keadilan, etika bisnis, dan kesejahteraan masyarakat, yang selaras dengan dimensi sosial dalam ESG. Penerapan prinsip sosial dalam industri halal dapat mencakup perlindungan hak pekerja, keadilan gender, pemberdayaan komunitas lokal, serta distribusi nilai ekonomi yang adil. Misalnya, industri kosmetika halal dapat memberdayakan komunitas perempuan pengusaha kecil dalam rantai pasokannya, sementara industri fesyen halal dapat memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah layak serta bekerja dalam kondisi yang aman. Selain itu, dimensi sosial juga menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses perumusan kebijakan dan standar halal. Partisipasi yang inklusif akan memperkuat legitimasi sosial industri halal serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk. Dengan demikian, aspek sosial dalam ESG memperluas makna halal tidak hanya sebatas status produk, melainkan juga proses yang mencerminkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Sementara itu, aspek governance (tata kelola) merupakan inti dari model ESG yang sangat relevan dengan penguatan ekosistem industri halal. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta pengawasan yang efektif. Dalam konteks industri halal, governance dapat diwujudkan melalui standar sertifikasi yang jelas, lembaga pengawas halal yang independen, serta sistem audit halal yang terintegrasi dengan teknologi digital (Camelia & Khoirurrizki, 2025).

Salah satu tantangan dalam industri halal global adalah disparitas standar sertifikasi halal di berbagai negara, yang menyebabkan fragmentasi pasar dan kebingungan konsumen. Penerapan governance berbasis ESG dapat mendorong harmonisasi standar halal internasional melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di era digital, pemanfaatan teknologi blockchain untuk *halal traceability* juga menjadi contoh konkret bagaimana governance dalam industri halal dapat diperkuat melalui transparansi rantai pasok. Tata kelola yang baik juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, perlindungan konsumen, serta integrasi prinsip etika bisnis Islam dalam setiap kebijakan dan praktik industri. Dengan demikian, *governance* tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga tentang menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap ekosistem halal. Jika ditelaah lebih dalam, integrasi model tata kelola berbasis ESG dalam ekosistem industri halal memberikan sejumlah peluang strategis (Zakaria, 2024). Pertama, meningkatkan daya saing global industri halal. Di tengah meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk berkelanjutan, produk halal yang terintegrasi dengan prinsip ESG akan memiliki keunggulan ganda: memenuhi kepatuhan syariah sekaligus memenuhi standar keberlanjutan global. Kedua, memperluas pasar non-muslim. Dengan semakin banyak konsumen yang peduli terhadap isu etika dan keberlanjutan, produk halal berbasis ESG berpotensi diterima lebih luas oleh masyarakat global, bahkan di luar komunitas muslim. Ketiga, memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Integrasi ESG menunjukkan komitmen industri halal terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, dan etika, sehingga memperkuat

reputasi global industri halal. Keempat, mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Model tata kelola berbasis ESG dalam industri halal dapat berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan global seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta aksi terhadap perubahan iklim. Namun demikian, implementasi model tata kelola berbasis ESG dalam industri halal tidak lepas dari tantangan.

Salah satunya adalah kesenjangan pemahaman dan kapasitas antara pelaku usaha besar dan UMKM halal. UMKM seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan standar ESG, baik dari sisi teknologi, biaya, maupun pengetahuan. Tantangan lain adalah harmonisasi standar global yang masih menghadapi resistensi politik, ekonomi, dan kultural antarnegara. Selain itu, penerapan ESG dalam industri halal berisiko menghadapi *greenwashing* atau sekadar simbolisme tanpa implementasi nyata, yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen (Judijanto *et la.*, 2025). Tantangan lain yang juga signifikan adalah perlunya integrasi nilai-nilai syariah dengan standar ESG global. Meskipun banyak irisan kesamaan, terdapat perbedaan pendekatan filosofis yang perlu dijembatani, misalnya dalam aspek governance yang dalam Islam tidak hanya sekadar akuntabilitas administratif, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, harmonisasi standar, serta pengawasan independen menjadi faktor krusial agar model tata kelola berbasis ESG benar-benar dapat memperkuat ekosistem industri halal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi dapat ditempuh (Putri, 2025). Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong integrasi ESG dalam regulasi industri halal, misalnya melalui insentif pajak, pendanaan hijau, atau sertifikasi terpadu halal-ESG. Kedua, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, industri, akademisi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berdaya saing. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain, big data, dan AI dapat menjadi katalis penerapan ESG dalam industri halal, khususnya untuk aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Keempat, program edukasi dan pendampingan bagi UMKM halal sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan menghindari ketimpangan dalam penerapan ESG. Kelima, integrasi nilai-nilai maqasid al-shariah sebagai kerangka etis dapat memperkuat legitimasi syariah sekaligus menyelaraskan standar halal dengan ESG global.

Model tata kelola berbasis ESG dalam industri halal bukan sekadar adopsi standar internasional, tetapi juga reinterpretasi nilai-nilai syariah dalam kerangka keberlanjutan global. Dalam jangka panjang, penerapan model tata kelola berbasis ESG akan memberikan dampak transformatif bagi ekosistem industri halal. Pertama, secara ekonomi, industri halal akan memiliki daya saing lebih kuat di pasar global, meningkatkan ekspor, serta menarik investasi hijau. Kedua, secara sosial, industri halal akan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta keadilan sosial yang inklusif. Ketiga, secara lingkungan, industri halal akan menjadi pionir dalam penerapan prinsip keberlanjutan yang selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga bumi sebagai amanah. Keempat, secara tata kelola, industri halal akan memiliki legitimasi dan kepercayaan yang lebih tinggi karena transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang terjaga. Dampak transformatif ini akan menjadikan industri halal bukan hanya sebagai motor ekonomi umat, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan yang relevan bagi seluruh masyarakat global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif untuk menganalisis secara mendalam penerapan model tata kelola berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam penguatan ekosistem industri halal. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami interaksi kompleks antara prinsip-prinsip ESG, regulasi syariah, serta praktik bisnis halal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dengan regulator halal, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang fokus pada keberlanjutan dan industri halal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* untuk memastikan representasi aktor yang relevan dalam ekosistem halal. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui telaah literatur dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, regulasi nasional maupun internasional, serta dokumen perusahaan yang mengadopsi prinsip ESG. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, meliputi tahap pengkodean, kategorisasi, dan identifikasi pola temuan yang berhubungan dengan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam industri halal. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, serta literatur ilmiah (Creswell & Creswell, 2018). Hasil penelitian diinterpretasikan dalam kerangka teori tata kelola berkelanjutan dan prinsip *maqasid al-shariah*, sehingga mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penyusunan model tata kelola berbasis ESG yang tidak hanya meningkatkan daya saing industri halal, tetapi juga memastikan keberlanjutan, keadilan sosial, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Model ESG Halal-Oriented: Perspektif Syariah dan Keberlanjutan

Model *Environmental, Social, and Governance* (ESG) Halal-Oriented merupakan sebuah kerangka konseptual yang bertujuan mengintegrasikan prinsip syariah dengan paradigma keberlanjutan global. ESG selama ini berkembang sebagai standar internasional yang digunakan untuk menilai keberlanjutan sebuah entitas bisnis, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, dalam konteks industri halal yang terus berkembang di tingkat global, diperlukan adaptasi dan reorientasi agar prinsip ESG tidak sekadar mengikuti standar universal, tetapi juga selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keseimbangan kehidupan (Ellerman, Joskow & Harrison, 2000). Model ESG Halal-Oriented bukan hanya menambahkan label halal pada kerangka ESG yang ada, melainkan melakukan harmonisasi antara prinsip keberlanjutan modern dengan prinsip syariah yang komprehensif. Dengan demikian, model ini menawarkan paradigma baru yang lebih holistik, yang tidak hanya memenuhi ekspektasi investor dan regulator, tetapi juga menjawab tuntutan umat Muslim terhadap kepatuhan syariah dalam rantai nilai global.

Dari perspektif lingkungan, ESG Halal-Oriented menekankan prinsip kebersihan, keberlanjutan, dan keseimbangan ekologi yang telah lama ditekankan dalam ajaran Islam. Konsep *khalīfah fi al-ardh* (manusia sebagai khalifah di bumi) memberikan dasar teologis bahwa manusia bertanggung jawab menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Hal ini sejalan dengan konsep sustainable development dalam kerangka global. Praktik pengelolaan lingkungan dalam ESG Halal-Oriented tidak hanya diukur berdasarkan indikator efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah, tetapi juga pada dimensi halal-thayyib, yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas industri tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan madharat bagi

masyarakat (Carbone & Smith, 2023). Misalnya, dalam industri halal pangan, tidak cukup hanya memastikan bahwa bahan baku bebas dari unsur haram, tetapi juga harus memastikan bahwa rantai produksinya tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, tidak merusak kesehatan pekerja, dan tidak menimbulkan pemborosan sumber daya. Dalam konteks ini, keberlanjutan dipahami sebagai bentuk ibadah, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga amanah Allah.

Dari aspek sosial, ESG Halal-Oriented menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Islam menekankan nilai persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan (*'adl*), dan kasih sayang (rahmah) yang harus diwujudkan dalam praktik bisnis. Dalam kerangka ESG global, dimensi sosial mencakup isu tenaga kerja, hak asasi manusia, keterlibatan komunitas, dan keadilan gender. Model Halal-Oriented kemudian memberikan dimensi tambahan berupa tanggung jawab sosial berbasis syariah, yang tidak hanya menuntut kepatuhan pada regulasi formal, tetapi juga memperhatikan *maqāsid al-syarī'ah* seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Sebagai contoh, perusahaan halal yang beroperasi dengan prinsip ESG Halal-Oriented tidak hanya wajib memberikan upah layak, tetapi juga harus menjamin bahwa pekerja dapat melaksanakan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan mental mereka, serta menghindari eksploitasi. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas Muslim, dengan cara memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dimensi tata kelola, ESG Halal-Oriented mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang dalam Islam dikenal dengan nilai amanah dan *siddiq*. Tata kelola perusahaan dalam perspektif syariah bukan hanya tentang kepatuhan pada hukum positif, tetapi juga tentang kejujuran dalam setiap transaksi, penghindaran dari praktik *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi).

Dalam konteks ini, tata kelola halal tidak hanya menuntut transparansi laporan keuangan, tetapi juga kesesuaian bisnis dengan fatwa-fatwa syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan ini, sehingga ESG Halal-Oriented mencakup dimensi governance yang lebih ketat dibandingkan standar ESG konvensional. Selain itu, aspek tata kelola ini juga melibatkan prinsip musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan, keterlibatan pemangku kepentingan secara inklusif, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari instrumen keuangan berkelanjutan. Model ESG Halal Oriented memiliki relevansi besar dalam ekosistem industri halal global. Dengan pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan, model ini dapat menjadi standar baru yang mengintegrasikan nilai syariah dengan praktik global terbaik (Karim, 2016). Sebagai contoh, dalam sektor keuangan syariah, ESG Halal-Oriented dapat memperkuat instrumen investasi halal seperti sukuk hijau (*green sukuk*) atau sukuk sosial (*social sukuk*) yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Di sektor pariwisata halal, model ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa destinasi wisata tidak hanya memenuhi standar halal dari sisi makanan dan fasilitas ibadah, tetapi juga dikelola dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sektor kosmetika halal, ESG Halal-Oriented dapat memastikan bahwa produk bebas dari bahan haram, diproduksi tanpa merusak lingkungan, serta memperhatikan aspek ethical sourcing, yaitu tidak mengeksploitasi hewan atau tenaga kerja. Perspektif syariah memberikan nilai tambah yang signifikan pada model ESG Halal-Oriented. Jika ESG konvensional terkadang

hanya dipandang sebagai strategi reputasi atau instrumen investasi, maka ESG Halal-Oriented memiliki dimensi spiritual yang menekankan bahwa setiap tindakan bisnis adalah bagian dari ibadah. Hal ini menciptakan motivasi yang lebih mendalam bagi pelaku usaha untuk mematuhi prinsip keberlanjutan, karena dorongan tidak hanya berasal dari regulasi atau tekanan pasar, melainkan juga dari kesadaran religius. Dengan demikian, ESG Halal-Oriented mampu menginternalisasi keberlanjutan ke dalam inti budaya organisasi, bukan sekadar sebagai kepatuhan formal.

Namun, penerapan model ESG Halal-Oriented juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, belum adanya standar global yang mengintegrasikan ESG dan halal secara formal menyebabkan adanya keragaman interpretasi di berbagai negara. Hal ini memerlukan peran aktif lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) atau *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) untuk menyusun pedoman yang dapat diadopsi secara luas. Kedua, masih rendahnya literasi pelaku industri halal terhadap ESG menyebabkan praktik keberlanjutan sering kali terabaikan atau hanya dijadikan formalitas. Oleh karena itu, dibutuhkan program edukasi, pelatihan, dan insentif agar perusahaan halal mampu mengintegrasikan ESG Halal-Oriented ke dalam strategi bisnis mereka. Ketiga, adanya biaya tambahan dalam implementasi ESG, seperti investasi pada energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan, dapat menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah. Dalam hal ini, dukungan pemerintah, investor, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mendorong adopsi model ini. Meskipun demikian, peluang yang ditawarkan oleh ESG Halal-Oriented sangat besar.

Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk halal dan produk berkelanjutan, model ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi industri halal. Produk dan jasa yang tidak hanya halal tetapi juga ramah lingkungan dan sosial akan memiliki daya tarik lebih besar, baik bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, model ini dapat memperkuat kontribusi industri halal terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena pada dasarnya nilai-nilai syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, pekerjaan layak, dan perlindungan lingkungan.

Dengan demikian, Model ESG Halal-Oriented merupakan inovasi konseptual yang berpotensi besar mengubah lanskap industri halal global. Model ini menempatkan prinsip syariah sebagai fondasi moral dan spiritual, sekaligus mengadopsi praktik keberlanjutan modern yang menjadi tuntutan global. Melalui integrasi antara syariah dan keberlanjutan, ESG Halal-Oriented mampu menciptakan ekosistem industri halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan bumi dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, implementasi model ini perlu didukung oleh regulasi yang jelas, standar internasional yang terintegrasi, edukasi yang masif, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil.

Analisis Peluang dan Tantangan ESG dalam Ekosistem Halal

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi kerangka kerja global yang banyak diadopsi untuk menilai kinerja keberlanjutan sebuah entitas bisnis. Dalam ekosistem industri halal yang berkembang pesat secara global, ESG memiliki posisi strategis, karena dapat menjadi jembatan antara tuntutan global akan keberlanjutan dengan kebutuhan umat Muslim akan kepatuhan syariah. Namun, penerapan ESG dalam ekosistem halal tidak sekadar menyalin konsep yang ada, melainkan memerlukan analisis kritis terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang harus dihadapi. Peluang muncul dari semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim dan non-Muslim terhadap pentingnya keberlanjutan, meningkatnya populasi Muslim dunia, serta adanya sinergi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan global. Sebaliknya, tantangan timbul dari keterbatasan literasi ESG di kalangan pelaku industri halal, biaya implementasi yang tidak sedikit, perbedaan standar antarnegara, serta masih lemahnya infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang mampu mengintegrasikan ESG dengan halal secara menyeluruh. Dengan demikian, analisis peluang dan tantangan ESG dalam ekosistem halal menjadi penting untuk merumuskan strategi yang dapat memastikan bahwa industri halal bukan hanya tumbuh dari sisi ekonomi, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi peluang, penerapan ESG dalam ekosistem halal dapat memberikan nilai tambah kompetitif yang sangat besar. Produk halal selama ini lebih dipandang dari sisi kepatuhan syariah, seperti kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Dengan mengintegrasikan ESG, produk halal tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan global. Hal ini membuka pasar yang lebih luas, karena konsumen non-Muslim yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial juga akan tertarik pada produk halal yang berlabel berkelanjutan. Sebagai contoh, produk pangan halal yang diproduksi dengan energi terbarukan, menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta memberdayakan komunitas lokal, akan memiliki daya tarik ganda. Bagi konsumen Muslim, produk tersebut halal dan *thayyib*, sementara bagi konsumen non-Muslim, produk tersebut etis, hijau, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi ESG dapat memperluas segmentasi pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat brand image perusahaan halal di tingkat global. Selain itu, peluang besar juga muncul dalam sektor keuangan syariah. Instrumen investasi berbasis syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, atau perbankan syariah dapat diperkuat dengan mengadopsi prinsip ESG. Misalnya, penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia telah menjadi contoh bagaimana integrasi halal dan keberlanjutan dapat berjalan harmonis. Investor global semakin banyak yang mencari instrumen keuangan berkelanjutan, sehingga sukuk hijau syariah berpotensi menarik dana dari investor Muslim maupun non-Muslim.

Keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil, transparansi, dan keadilan, memiliki titik temu dengan prinsip governance dalam ESG. Dengan mengintegrasikan ESG, lembaga keuangan syariah dapat memperluas basis investor, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Peluang lainnya terlihat dalam pariwisata halal, yang merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat. Wisata halal yang terintegrasi dengan prinsip ESG tidak hanya menawarkan destinasi yang ramah Muslim, tetapi juga menjaga kelestarian alam, memberdayakan masyarakat lokal, serta menerapkan tata kelola yang baik. Hal ini dapat menarik wisatawan Muslim global yang semakin peduli pada isu lingkungan, sekaligus wisatawan non-Muslim yang mengutamakan ekowisata. Dengan mengedepankan ESG, pariwisata halal tidak hanya menjadi tren jangka pendek, tetapi dapat menjadi model pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan berdaya tahan tinggi. Di sisi lain, kosmetika dan farmasi halal juga memiliki peluang besar melalui integrasi ESG.

Konsumen global kini semakin selektif terhadap produk kecantikan dan kesehatan, tidak hanya dari sisi keamanan dan kehalalan bahan, tetapi juga dari proses produksinya. Produk kosmetika halal yang mengusung zero waste production, bebas dari uji coba hewan, menggunakan bahan alami berkelanjutan, serta diproduksi dengan etika sosial yang tinggi, akan lebih mudah diterima pasar global. Integrasi ESG memberikan added value yang membuat produk halal bukan hanya kebutuhan religius, tetapi juga menjadi pilihan gaya hidup

berkelanjutan. Selain peluang pasar, penerapan ESG dalam ekosistem halal juga membuka peluang regulasi dan kebijakan publik. Banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, sedang berupaya menjadikan industri halal sebagai sektor unggulan. Dengan memasukkan ESG dalam kebijakan industri halal, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini memberikan legitimasi internasional, karena menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya eksklusif bagi umat Muslim, tetapi juga relevan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan sosial, dan tata kelola yang baik. Namun, di balik peluang yang besar tersebut, penerapan ESG dalam ekosistem halal juga menghadapi berbagai tantangan serius.

Tantangan pertama adalah keterbatasan literasi ESG di kalangan pelaku industri halal, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi sektor ini. Bagi banyak UMKM halal, memahami dan menerapkan prinsip halal saja sudah cukup menantang, apalagi harus menambahkan lapisan ESG yang kompleks. Akibatnya, penerapan ESG sering kali hanya dilakukan oleh perusahaan besar, sementara UMKM tertinggal. Padahal, keberlanjutan ekosistem halal sangat bergantung pada peran UMKM. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi, pelatihan, dan pendampingan khusus agar UMKM mampu mengintegrasikan ESG secara bertahap dan terjangkau. Tantangan kedua adalah biaya implementasi. Penerapan ESG sering kali memerlukan investasi awal yang tidak sedikit, misalnya untuk beralih ke energi terbarukan, mengelola limbah dengan teknologi canggih, atau membangun sistem tata kelola yang transparan. Bagi perusahaan halal skala besar, mungkin hal ini bisa diatasi dengan mudah. Namun, bagi perusahaan kecil, biaya tambahan ini bisa menjadi hambatan serius. Tanpa insentif fiskal, subsidi, atau dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, penerapan ESG dapat dianggap sebagai beban, bukan peluang.

Tantangan ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan publik dan kolaborasi multi-pihak untuk memastikan ESG dapat diterapkan secara merata. Tantangan ketiga adalah keragaman standar dan regulasi. ESG masih merupakan konsep yang berkembang dan belum memiliki standar tunggal yang diakui secara global. Demikian pula, standar halal berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada otoritas sertifikasi masing-masing. Integrasi antara ESG dan halal akan semakin rumit jika tidak ada harmonisasi standar. Sebagai contoh, suatu produk bisa dianggap halal di satu negara, tetapi tidak diakui di negara lain. Demikian pula, laporan keberlanjutan yang memenuhi standar ESG di satu kawasan belum tentu diterima di kawasan lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan halal yang ingin memperluas pasar global. Tantangan keempat adalah greenwashing dan halal-washing, yaitu praktik manipulasi informasi dengan mengklaim produk ramah lingkungan atau halal tanpa bukti yang memadai. Risiko ini semakin besar jika ESG dan halal dijadikan strategi branding tanpa pengawasan ketat. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pasar terhadap seluruh ekosistem halal.

Oleh karena itu, diperlukan sistem audit independen, pengawasan ketat, serta sanksi tegas untuk mencegah praktik semacam ini. Tantangan kelima adalah perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan. Integrasi ESG dalam ekosistem halal memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, pelaku industri, masyarakat sipil, dan investor. Namun, masing-masing pihak memiliki prioritas yang berbeda. Pemerintah cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi, lembaga halal pada kepatuhan syariah, investor pada profitabilitas, sementara masyarakat sipil pada aspek lingkungan dan sosial. Jika tidak ada mekanisme

koordinasi yang efektif, integrasi ESG dapat terhambat oleh tarik-menarik kepentingan ini. Dengan adanya peluang dan tantangan tersebut, strategi untuk mengoptimalkan penerapan ESG dalam ekosistem halal harus bersifat holistik, kolaboratif, dan kontekstual. Holistik berarti bahwa ESG tidak boleh dilihat sebagai tambahan di luar prinsip halal, melainkan harus diintegrasikan ke dalam seluruh rantai nilai halal, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi. Kolaboratif berarti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus terlibat aktif, dengan peran yang jelas dan saling melengkapi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan insentif, lembaga sertifikasi halal harus mengembangkan standar yang terintegrasi dengan ESG, pelaku industri harus berkomitmen pada keberlanjutan, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas. Kontekstual berarti bahwa penerapan ESG harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan sektor, sehingga tidak membebani pelaku usaha, khususnya UMKM.

Pada akhirnya, integrasi ESG dalam ekosistem halal dapat dipandang sebagai kesempatan strategis untuk meneguhkan posisi industri halal dalam percaturan global. Jika ekosistem halal berhasil mengadopsi ESG secara efektif, maka produk dan jasa halal akan memiliki nilai tambah yang unik: halal, etis, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing industri halal, tetapi juga menjadikannya sebagai motor penggerak pencapaian SDGs. Namun, jika tantangan yang ada tidak diatasi dengan baik, maka ESG dalam ekosistem halal berisiko menjadi jargon semata, tanpa dampak nyata bagi keberlanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan, strategi kelembagaan, inovasi teknologi, serta komitmen moral para pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan bahwa peluang besar dapat dimanfaatkan dan tantangan serius dapat diatasi.

Mekanisme Implementasi Manajemen Model ESG dalam Industri Halal

Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam industri halal merupakan agenda strategis yang menuntut pendekatan sistematis, integratif, dan berkesinambungan. Sebagai kerangka kerja global, ESG bertujuan untuk mengukur serta memastikan kinerja perusahaan tidak hanya dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dimensi keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Dalam ekosistem industri halal, prinsip ESG menemukan titik temu yang kuat dengan nilai-nilai syariah yang menekankan halal, thayyib, keadilan, dan kemaslahatan. Karena itu, mekanisme implementasi ESG dalam industri halal tidak bisa dilepaskan dari penyelarasan antara standar global keberlanjutan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), sehingga setiap langkahnya dapat mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan spiritual, keberlanjutan ekologi, dan keberdayaan sosial. Mekanisme ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diterapkan oleh semua lapisan industri halal, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM, serta relevan bagi berbagai sektor, seperti pangan, farmasi, kosmetika, pariwisata, hingga keuangan syariah.

Langkah awal dalam mekanisme implementasi ESG pada industri halal adalah penyusunan kerangka regulasi dan standar yang mengintegrasikan prinsip halal dengan prinsip ESG. Regulasi ini dapat datang dari pemerintah, lembaga sertifikasi halal, maupun organisasi internasional yang berfokus pada industri halal. Penyusunan kerangka regulasi diperlukan agar terdapat kejelasan parameter yang harus dipenuhi oleh pelaku industri, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Misalnya, dalam aspek lingkungan, standar dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Dalam aspek sosial, standar bisa mengatur perlindungan pekerja, kesetaraan gender, dan keterlibatan komunitas lokal. Sementara itu, dalam aspek tata kelola, standar bisa menekankan transparansi laporan, kepatuhan syariah, serta keterlibatan dewan pengawas syariah dalam pengambilan keputusan. Penyusunan standar yang jelas dan terukur sangat penting agar

implementasi ESG dalam industri halal tidak berhenti pada jargon, tetapi benar-benar dapat dipantau dan dievaluasi. Mekanisme berikutnya adalah internalisasi ESG dalam strategi dan budaya perusahaan halal.

Implementasi ESG tidak bisa hanya bersifat formal atau administratif, melainkan harus diintegrasikan ke dalam visi, misi, dan nilai inti perusahaan. Hal ini menuntut adanya komitmen dari manajemen puncak (*top management commitment*) untuk menjadikan ESG sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Misalnya, perusahaan halal tidak hanya mencantumkan target profit dalam rencana bisnisnya, tetapi juga target pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta transparansi tata kelola. Budaya perusahaan juga harus mendukung praktik keberlanjutan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan, membangun kesadaran lingkungan, serta menanamkan nilai amanah, adil, dan ihsan dalam seluruh aktivitas operasional. Dengan internalisasi seperti ini, ESG tidak akan dipandang sebagai kewajiban eksternal, melainkan sebagai bagian dari identitas dan jati diri perusahaan halal. Setelah internalisasi, mekanisme implementasi berlanjut pada penguatan tata kelola organisasi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam industri halal, keberadaan DPS menjadi pembeda utama dari perusahaan konvensional. DPS tidak hanya berfungsi memastikan kepatuhan terhadap fatwa halal, tetapi juga dapat diperluas perannya untuk mengawasi penerapan ESG. Dengan demikian, DPS dapat mengembangkan fatwa atau pedoman terkait praktik bisnis ramah lingkungan, sosial yang adil, dan tata kelola transparan. Di sisi lain, tata kelola organisasi harus diperkuat dengan membentuk komite khusus keberlanjutan yang bekerja sama dengan DPS untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis sejalan dengan prinsip ESG. Keterlibatan dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam tata kelola ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi perusahaan halal. Dalam aspek lingkungan (*environmental*), mekanisme implementasi ESG dalam industri halal menekankan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan (Qadri, 2024). Hal ini mencakup penggunaan energi bersih, efisiensi penggunaan air, pengelolaan limbah halal, serta inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Misalnya, perusahaan makanan halal dapat menerapkan teknologi pengolahan limbah organik menjadi pupuk, sehingga limbah tidak mencemari lingkungan dan justru memberi nilai tambah. Industri fashion halal dapat memanfaatkan material ramah lingkungan seperti serat organik atau bahan daur ulang untuk mengurangi jejak karbon.

Selain itu, mekanisme implementasi juga harus mencakup pemantauan emisi karbon, sertifikasi hijau, dan pelaporan keberlanjutan lingkungan. Semua ini harus dipadukan dengan prinsip *halal-thayyib* yang menuntut produk bukan hanya halal, tetapi juga baik bagi kesehatan dan lingkungan. Pada aspek sosial (*social*), mekanisme implementasi ESG dalam industri halal berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Implementasi dapat dilakukan melalui kebijakan upah yang adil, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Perusahaan halal juga harus memberikan ruang bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah, sehingga mencerminkan penghormatan pada nilai spiritual. Lebih jauh, industri halal dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan dengan petani, nelayan, atau produsen kecil dalam rantai pasok halal. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat diarahkan pada pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, implementasi aspek sosial dalam ESG akan memperkuat peran industri halal sebagai motor kemaslahatan umat dan bukan sekadar entitas ekonomi. Pada aspek tata kelola

(*governance*), mekanisme implementasi ESG dalam industri halal menuntut adanya transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap syariah.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kode etik perusahaan berbasis syariah, sistem audit syariah, serta pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek halal, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Mekanisme implementasi juga harus mendorong adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik melalui forum konsultasi, musyawarah, maupun dialog terbuka. Tata kelola yang baik juga berarti menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi keuangan. Selain itu, perusahaan halal harus memastikan bahwa proses pengadaan (*procurement*) dilakukan secara etis, adil, dan bebas dari korupsi. Dengan *governance* yang kokoh, industri halal tidak hanya memperoleh kepercayaan konsumen Muslim, tetapi juga diakui secara global sebagai entitas bisnis yang transparan dan berintegritas. Selain penguatan di tingkat perusahaan, mekanisme implementasi ESG dalam industri halal juga membutuhkan dukungan ekosistem yang lebih luas, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, regulasi yang mendukung, serta infrastruktur untuk mempercepat adopsi ESG dalam industri halal. Misalnya, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak bagi perusahaan halal yang menggunakan energi terbarukan atau menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan berkelanjutan, seperti green sukuk atau pembiayaan bagi hasil untuk proyek ramah lingkungan. Akademisi dapat berperan dalam riset dan pengembangan inovasi ESG yang sesuai dengan prinsip halal, sementara masyarakat sipil dapat bertindak sebagai pengawas independen terhadap implementasi ESG. Dengan sinergi ini, mekanisme implementasi tidak hanya bergantung pada perusahaan, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh ekosistem halal. Salah satu elemen penting dalam mekanisme implementasi adalah sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Perusahaan halal yang mengadopsi ESG harus memiliki indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerjanya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Indikator ini dapat mencakup jumlah emisi karbon yang berhasil dikurangi, jumlah pekerja yang mendapatkan pelatihan, jumlah dana CSR yang dialokasikan, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang transparan harus diterbitkan secara rutin agar pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana komitmen ESG dilaksanakan (Karim, 2016). Mekanisme evaluasi juga dapat dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang baik, implementasi ESG tidak hanya menjadi klaim, tetapi juga terbukti secara empiris. Mekanisme implementasi ESG dalam industri halal juga menuntut adanya pendekatan bertahap (*phased approach*), terutama bagi UMKM. Tidak semua perusahaan dapat langsung menerapkan seluruh aspek ESG sekaligus, karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas.

Oleh karena itu, mekanisme implementasi dapat dimulai dengan langkah sederhana yang sesuai kemampuan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menyediakan fasilitas ibadah, atau menyusun laporan sederhana tentang aktivitas sosial perusahaan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan dapat meningkatkan implementasi dengan mengadopsi teknologi hijau, menyusun laporan keberlanjutan lengkap, dan memperluas keterlibatan sosial. Pendekatan bertahap ini penting agar ESG tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai proses pembelajaran menuju keberlanjutan. Secara keseluruhan, mekanisme implementasi ESG dalam industri halal mencakup beberapa tahap utama: penyusunan regulasi dan standar, internalisasi nilai ESG dalam

strategi perusahaan, penguatan tata kelola organisasi, penerapan aspek lingkungan-sosial-governance dalam operasional, dukungan ekosistem eksternal, sistem monitoring dan evaluasi, serta pendekatan bertahap bagi pelaku usaha. Keseluruhan mekanisme ini harus dibangun di atas landasan nilai-nilai syariah agar tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual. Dengan mekanisme yang terstruktur dan konsisten, industri halal dapat tampil sebagai pionir dalam mengintegrasikan agama, etika, dan keberlanjutan dalam dunia bisnis modern.

Pada akhirnya, implementasi ESG dalam industri halal bukan hanya soal memenuhi standar global, tetapi juga tentang membangun masa depan industri halal yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Mekanisme yang tepat akan memastikan bahwa pertumbuhan industri halal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola global. Dengan begitu, industri halal dapat berperan sebagai motor pembangunan berkelanjutan yang memberi kontribusi nyata bagi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sekaligus mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip manajemen *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat menjadi strategi kunci dalam memperkuat keberlanjutan dan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun global. Integrasi prinsip lingkungan mendorong industri halal untuk mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan produksi yang berorientasi pada ekonomi sirkular sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian alam. Dimensi sosial berperan penting dalam memastikan keadilan, kesejahteraan tenaga kerja, perlindungan konsumen, serta pemenuhan nilai syariah yang menekankan pada aspek *tayyib* (baik, sehat, dan bermanfaat). Sementara itu, tata kelola yang baik akan memberikan kerangka regulasi, transparansi, serta akuntabilitas yang mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat integritas sistem industri halal. Secara keseluruhan, model tata kelola berbasis ESG bukan hanya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), tetapi juga memperkuat posisi industri halal sebagai pilar ekonomi yang inklusif, beretika, dan kompetitif di pasar global. Ke depan, tantangan implementasi model ini terletak pada harmonisasi regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas pelaku usaha halal agar mampu menerapkan prinsip ESG secara konsisten. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan lembaga sertifikasi halal, ekosistem industri halal dapat tumbuh berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan global, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Camelia, P., & Khoirurrizki, K. Z. (2025). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Investasi Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 192-204.
- Carbone, J. C., & Smith, V. K. (2013). Valuing nature in a general equilibrium. *Journal of Environmental Economics and Management*, 66(1), 72-89. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.12.007>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Ellerman, A. D., Joskow, P., & Harrison, D. (2000). *Markets for Clean Air: The U.S. Acid Rain Program*. Cambridge University Press

- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1011-1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Hamdani, H., & Raffi, R. M. (2025). Exploring environmental, social and governance (ESG) in the halal industry in Brunei. *Halalsphere*, 5(1), 42-50. <https://doi.org/10.31436/hs.v5i1.115>
- Hasanah, N., Azizah, N., Nikmatussolihah, M. R., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan industri halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 219-233. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.2.219-233>
- Judijanto, L., Fathoni, A. I., Fauziah, D., Lasmiatun, K., & Ashari, M. I. (2025). ESG (Environmental, Social, Governance) Integration in Global Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 3(01). <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1612>
- Karim, A. (2016). *Islamic finance's role in developing the halal economy*. ISRA International Journal of Islamic Finance
- Putri, W. S. T. (2025). The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns. *Journal of Halal Review*, 1(1), 51-64. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-05)
- Qadri, H. M. U. D. (2024). *The global halal industry: A research companion*. Routledge.
- Rahmawati, H. T., Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). *Overview Industri Halal di Perdagangan Global*. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72-81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657)
- Sari, C. M., Fitriantsany, F., Bashiroh, N. M., & Irham, M. A. (2024, December). Potential for Sustainable Halal Industry Development in Indonesia: Literature Review and Global Trend Analysis. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* (Vol. 4, pp. 158-161). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v4i0.689>
- Septiyani, D. A., & Adinugraha, H. H. (2025). Ekonomi Kreatif dan Industri Halal: Analisis Model Bisnis Berkelanjutan di Indonesia. *Mubeza*, 15(2), 1-8. <https://doi.org/10.54604/mbz.v15i2.531>
- Zakaria, A. (2024). The Role of Sustainable Finance in Islamic Economics: An Analysis of Green Investment in the Halal Industry. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(3), 82-87.